

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN PASIMARANNU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh

**MARIANU
NIM 10538289614**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Marianu**, NIM 10538 2896 14 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0014 Tahun 1440 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019.

25 Jumadil Awal 1440 H
Makassar, -----
31 Januari 2019 M

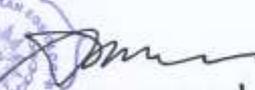
- PANITIA UJIAN
- Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rakhman Rahim, SE, MM ()
- Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. ()
- Sekretari : Dr. Baharullah, M.Pd. ()
- Penguji :
1. Taufik Akib, S.Pd., M.Pd. ()
 2. Dr. H. Agus Muhsin, M.Pd. ()
 3. Dra. Hj. Rosniah Baharuddin, M.Si ()
 4. Dr. Nurjina Subair, M.Si ()
- 

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Nama : Marianu

NIM : 10538 2896 14

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.



25 Jumadil Awal 1440 H
Makassar, 31 Januari 2019 M

Dibaca dan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. ST. Fatimah Taha, M.Si.

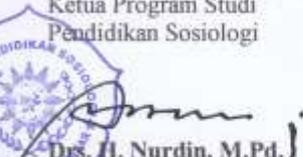
Tasrif Akib, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

MOTTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S Al Baqarah : 153)

Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain (HR. Thabrani dan Daruquthni)

Kamu mungkin bisa menunda waktu, tapi waktu tidak akan bias menunggumu, karena waktu yang hilang tidak akan pernah bisa kembali (Benjamin Franklin)

ABSTRAK

Marianu, 2018 Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Skripsi. Program Studi pendidikan sosiologi, Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan universitas muhammaditah Makassar. Pembimbing oleh Ibu.Hj. Sitti Fatimah Tola, dan Tasrif Akib.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi. Secara sosial ekonomi kemiskinan dapat menjadi beban masyarakat, menyebabkan rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar serta factor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial, di Kabupaten Kepulauan Selayar yang berpedoman pada peraturan Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat masalah yakni pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan namun diberikan bantuan. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang menjadi pendukung yakni ketersediaan anggaran, serta faktor yang menjadi penghambat yakni pendataan yang tidak professional karena data masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan tidak pernah berubah dari tahun 2013 hingga 2018.

Kata Kunci :Peran, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Masyarakat Misk

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wata'ala, dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan judul “ **Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di kecamatan pasimarannu Kabupaten kepulauan selayar**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar Salam dan shalawat tidak lupa penulis

kirirkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Allah Wasallam, yang manasegala tindakannya menjadi tauladan untuk kita semua.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan msyarakat miskin di kecamatan pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, sekiranya ada masukan dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun, maka penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan

mengucapkan terima kasih yang sedalam- dalamnya terkhusus kepada kedua orang tua, Ayahanda La use dan Ibunda Sunti yang senantiasa memberi semangat dan dukungannya dalam kelancaran studi penulis. Berkat kekuatan do'a luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Tak lupa didikan dan perjuangannya dalam membesarkan penulis, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara didunia maupun di akhirat kelak.

Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis haturkan kepada :

Dr. H. Abd. Rahman Rahim SE, MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

Erwin Akib, M.P.d.,Ph.D Selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Drs. H. Nurdin, M.Pd Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kaharuddin, M.Pd, Ph.D.Selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi

Dra, Hj. Sitti Fatimah Tola, M.Si. selaku Pembimbing I.yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Tasrif Akib, S,Pd., M.Pd. selaku Pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.

Keluarga, atas doa dan dukungannya selama penulisan skripsi ini.

Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Desember 2018

penulis

Marianu

NIM. 10538289614

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E, DEFINISI OPERASIONAL.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
B. KERANGKA KONSEP.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. JENIS PENELITIAN	45
B. LOKASI PENELITIAN	46
C. INFORMAN PENELITIAN	46
D. FOKUS PENELITIAN	47

E. INSTRUMENT PENELITIAN.....	47
F. JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN.....	48
G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	49
H. TEKNIK ANALISIS DATA.....	52
I. TEKNIK KEABSAHAN DATA	52
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HISTORIS PENELITIAN	54
A. SEJARAH SELAYAR	54
B. KECAMATAN PASIMARANNU	59
C. KELURAHAN MAJAPAHIT	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. HASIL PENELITIAN.....	62
B. PEMBAHASAN	75
SIMPULAN DAN SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar .1.Bagan Kerangka Konsep.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 2.3 luas wilayah dan presentase terhadap luas wilayah Menurut keamatan pasimarannu.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Pedoman Wawancara.....	88
Lembar Observasi.....	90
Foto-Foto.....	91

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini belum berhasil mengantisipasi kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi topik sentral di Indonesia, sejak masa reformasi dilanda krisis multi dimensional pada tahun 1998. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidak mampuan menyampaikan aspirasi. Secara sosial ekonomi kemiskinan dapat menjadi beban masyarakat, menyebabkan rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat.

Peran pemerintah sangat penting dalam merancang dan menghadapi masalah pembangunan ekonomi. Seberapa jauh peran pemerintah menentukan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Peran itu dapat dilihat dari sikap pemerintah dalam menyelesaikannya. Peran pemerintah adalah sebagai pengatur kebijakan masalah pembangunan ekonomi, Pemerintah juga yang mengatur bagaimana pelaksanaan rancangan pembangunan, apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Peran pemerintah adalah sebagai pengendali.

Zaman yang sekarang serba global, peranan pemerintah pada setiap bangsa dan negara melakukan pembangunan ekonomi merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih makmur, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, bahkan pada waktu yang

diharapkan akan menjadi negara yang maju. Begitu besarnya masalah negara berkembang, Pembangunan bukan hanya sekedar tugas dan peran

pemerintah sebagai aparatur negara, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen lapisan masyarakat. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembangunan. Dalam upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan sebagai sektor perekonomian hingga jumlah keluarga miskin dapat berkurang, di butuhkan pengawasan dan pengaturan oleh negara atau pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan yang seimbang, karena keseimbangan membutuhkan pengawasan terhadap produksi, distribusi dan dan komoditas. Untuk itu pemerintah harus membuat suatu rencana atau langkah-langkah dalam upaya mengurangi jumlah keluarga miskin akibat ketidak seimbangan ekonomi dan sosial yang mengancam negara sedang berkembang.

Pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan

kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing.

Implementasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2012 disajikan untuk setiap sasaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012. Secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari upaya pemberdayaan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan difokuskan pada berbagai bidang yang dianggap dapat meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi kerakyatan, bidang peningkatan infrastruktur, dan dibidang lainnya yang dilakukan secara tepat sasaran dan berdaya guna.

Dalam pasal 215 UU No. 32 Tahun 2004 ditetapkan: Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/ kota dan atau pihak ketiga mengikut sertakan pemerintah desa dan badan-badan permusyawaratan desa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pemerintah Desa dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial yang antara lain dalam rangka menaggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Majapahit.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 10 Tahun 2012, Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.

Selanjutnya BPS dalam menentukan standar garis kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang harus di penuhi seseorang untuk dapat hidup layak, yaitu apabila penduduk pengeluarannya tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan

setara 2.100 kalori per hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum non makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, transportasi, dan aneka barang/ jasa lainnya, maka di kategorikan miskin. Sementara itu, penduduk yang tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara dengan 1.800 kalori per hari di kategorikan fakir miskin.

Sehubungan dengan penugasan tersebut Pemerintah Desa Majapahit telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Majapahit. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa salahsatu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat ditingkatkan apabila kemiskinan dapat dikurangi. Kemiskinan dapat dikurangi apabila ada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan pemerataan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta akses berusaha dan memperoleh kesempatan kerjaserta stabilitas keamanan dan tidak adanya gejolak sosial. Apabila pertumbuhan dan pemerataan tidak dapat dilaksanakan dan stabilitas keamanan tidak terkendali, akan berdampak meningkatnya tingkat kemiskinan.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan

pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangannya secara optimal sehingga mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan negara, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik. Ryaas Rasyid mengemukakan fungsi 3 pemerintahan yaitu melakukan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan.

Dalam fungsi pelayanan, pemerintah sebagai aparatur negaraberusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam fungsi pembangunan, pemerintah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Sedangkan pengaturan diterapkan sebagai regulator yang mengatur jalannya sistem pemerintahan sehingga tercipta kestabilan dalam berbagai bidang. Hal ini akan mempermudah pemerintah untuk mencapai tujuan negara.

Begitupun dengan kondisi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di bagian

Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, dan merupakan daerah otonom secara administrasi memiliki 11 kecamatan dan mempunyai iklim yang sangat beragam. Beberapa bagian wilayahnya merupakan lahan kering iklim basah dan bagian yang lain merupakan lahan kering iklim kering, selain itu sebagai daerah penyangga kota Makassar yang merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, juga dengan banyaknya daerah-daerah kabupaten lain yang berbatasan secara administratif menjadikan daerah ini sangat potensial dalam pengembangan dan peningkatan sektor perekonomian berbasis pertanian, Sebagai daerah yang memiliki potensi untuk peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2018 yang disusun ini dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen pemerintah Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja. Di samping itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar agar lebih terarah dan terjamin tercapainya program pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

Mengacu pada visi pemerintah Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar yakni“Terwujudnya Selayar yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan”.Selayar yang

Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, mengandung makna bahwa Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan segenap ipotensi dan sumber daya yang berdaya saing kuat, bercita-cita menempatkan diri sebagai daerah yang handal dalam peningkatan kualitas kesehatan dan mutu pendidikan masyarakat serta peningkatan daya beli masyarakat. Selayar yang Handal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, mengandung makna bahwa Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan segenap potensi dan sumber daya yang berdaya saling kuat, bercita-cita menempatkan diri sebagai daerah yang handal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan prinsip-prinsip good governance dan handal dalam fungsi dan perannya sebagai koordinator, fasilitator dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan program dan kegiatan yang terbaik dalam mencapai lompatan angka Indeks Pembangunan Manusia IPM yang terbesar diantara daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Olehnya itu, diupayakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dari seluruh pelaku pembangunan agar berorientasi pada perbaikan angka Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat.

Berdasarkan target capaian angka IPM yang diproyeksikan lima tahun ke depan, minimal terjadi peningkatan sebesar 3,01 persen. Proyeksi ini cukup signifikan peningkatannya bila dibandingkan dengan capaian lima tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,60 persen. Kondisi ini akan tercapai dengan asumsi bahwa intervensi yang besar dalam bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan yang berdampak langsung dan mendorong percepatan Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana telah dilakukan pada pelaksanaan RPJMD Pertama (2016-2018) tetap dilanjutkan dan ditingkatkan.

Hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang seharusnya meninggalkan kemiskinannya masih tetap miskin serta data masyarakat miskin tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Realitas ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif bisa saja berkurang tetapi secara kualitatif tidak mengalami perubahan mendasar. Berdasarkan pemantauan penulis ada kecenderungan di masyarakat, ketidaksesuaian antara program kemiskinan dengan orang yang dilayani dalam hal ini ada pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran (orang yang mampu justru dapat bantuan sedangkan orang yang tidak mampu tidak tersentuh bantuan pemerintah). Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah daerah yang lebih efektif untuk dapat memajukan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat serta mampu membuat masyarakat yang diberdayakan untuk keluar dari ketidakberdayaan. Hal ini sesuai dengan target RPJMD Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan tantangan terberat bagi pemerintah daerah Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk lebih strategis serta bagaimana membuat masyarakat miskin secara kualitatif dijauhkan dari kemiskinan karena realitas yang ada dari dulu sampai sekarang yang menjadi orang miskin tidak berubah.

Berdasarkan penjelasan diatas, suatu hal menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pemberdayaan masyarakat miskin dengan mengangkat

judul penelitian, “**Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut maka dalam rumusan masalah ini peneliti menetapkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah kabupaten kepulauan selayar dapat dilihat dari upaya pemberdayaan sumber daya manusia.?
2. Bagaimana Implementasi PERDA Kabupaten Kepulauan Selayar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar,?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi PERDA Kabupaten Kepulauan Selayar No.10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
2. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis,
diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

2. Manfaat praktis,
 - a. Untuk pemerintah sebagai masukan untuk mengembangkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan pasimarannu kabupaten kepulauan selayar di sulawesi selatan.
 - b. Untuk pembaca, hasil penelitian ini menjadi informasi bagi pembaca tentang pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan pasimarannu kabupaten kepulauan selayar di sulawesi selatan.
 - c. Untuk penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap proses pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat miskin di sulawesi selatan.

E. Definisi Operasional

1. Peran Pemerintah Daerah adalah berperan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya, dimana pemerintah daerah mengayomi dan meleyani masyarakat serta mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.
2. Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kopetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.
3. Masyarakat Miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang

mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Hasil Penelitian yang Relevan

hasil kajian literatur yang berhasil dikumpulkan peneliti yang bersumber dari jurnal ilmiah, yaitu;

Pertama, Zuhroh Rosyidah. 2017 judul penelitian analisis peran pemerintah kota dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program desaku menanti di kota malang menyimpulkan bahwa Rehabilitas sosial bagi gelandangan Dan pengemis melalui pengembangan model program desaku menanti berusaha menjawab persoalan tentang bagaimana menangani masalah gelandangan dan pengemis, pelibatan banyak sektor sangat diperlukan, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat serta dunia usaha, dengan berbagai intervensi tersebut diharapkan para warga binaan sosial bisa kembali hidup secara normatif dan tidak kembali kejalan. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dan keterlibatan pemerintah kota malang dalam pendampingan program desaku menanti agar warga binaan sosial menjadi warga masyarakat yang mandiri. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kalitatif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah kota malang yang diwakili oleh organisasi perangkat daerah mutlak diperlkan, Dan sebagai OPD yang bertanggungjawab di bidang kesejahteraan, maka dalam hal ini dinas sosial memegang peran knci dalam keberhasilan program ini.

kedua, Dedy Arfiyanto 2012 judul penelitian analisis pemberdayaan masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program transmigrasi umum menyimpulkan bahwa pembangunan masyarakat Dan pemberdayaan rakyat tidak mungkin dapat dipisahkan dari arena Dan konteks dimana ia beroperasi, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi Dan program pembangunan kesejahteraan sosial. salah satu solusi untuk yang ditawarkan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan programnya yaitu melalui program transmigrasi, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat membuka lahan baru untuk meningkatkan taraf hidupnya Dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi, dengan mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. dalam penelitian menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian a peran dinas tenaga kerja Dan transmigrasi b pemberdayaan masyarakat miskin di daerah transmigran. dengan populasi informan.8 sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan berupa indept interview, observasi, dokumen selanjutnya dianalisa dengan menggunakan diskriptif kualitatif. hasil analisa menunjukkan peran dinas tenaga kerja Dan transmigrasi sangat berperan aktif Dan dapat memberdayakan masyarakat miskin di daerah transmigran

ketiga, Muhammad nurdin 2014 penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagug di kecamatan biringbulu kabupaten gowa. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Dan analisis data adalah analisis data kualitatif. teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara Dan dokumentasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ; peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung sudah berjalan dengan baik, akan tetapi belum maksimal di karenakan masih banyak kelompok tani belum mendapatkan pelatihan; Dan pemerintah daerah memberikan bantuan bibit, pupuk serta bantuan simpan pinjam.

2. Pengertian Pemerintah

Menurut C.F.Strong (1960) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negarayang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 ayat 2 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2009:25) adalah :Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang di ingin secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.Secara etimologi, pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi,Kabupaten/Kota) dan desa berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan pemerintahan. Seperti di negara kesatuan lainnya, daerah di Indonesia tidak bersifat negara, karena itu didaerah tidak memiliki kekuasaan negara dan atribut kenegaraan lainnya seperti ditingkat pusat/nasional. yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan pemerintahan „tertentu“ menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang di bantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam melakukan otonomi daerah perlu ases yang harus dijalankan sebagai berikut :

- a) Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.
- b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi).
- c) Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara formal, otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai

dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan literatur otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. Sebagai realisasi ases desentralisasi kepada Daerah, diserahkan berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sekitar 11 bidang pemerintahan.

Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli di atas bahwa pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus memiliki sinergitas yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam hubungannya diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Lebih luas dari pada itu, pemerintah mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3. Peran pemerintah

Dalam ekonomi sektor publik berkaitan erat dengan pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan publik. Kebijakan publik diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penyediaan barang-barang konsumsi lain dalam ekonomi publik peran pemerintah sangat penting.

Peran pemerintah itu di antaranya sebagai fungsi alokasi tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat transaksi antara penjual dan pembeli.

Peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan)

berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya,

konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang disebut

dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Terkait dengan peran pemerintah dalam memberikan layanan pendaftaran hak cipta maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Pemerintah daerah provinsi dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ketentuan umum angka 5, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

4. Tugas Pokok Pemerintah

Tugas-tugas pokok pemerintah kemudian dijelaskan oleh Ryaas Rasyid (2000 : 13) sebagai berikut :

Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di daerah, arah tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandaskan pada penyelenggaraan kepentingan umum. Sudah menjadi tugas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk

menjaga kepentingan umum tersebut guna mencapai harapan daerah dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa.

Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan akan menunjukkan gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka secara otomatis akan berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya. Hal ini juga akan berdampak pada terciptanya keteraturan hidup dalam negara. Berdasarkan beberapa fungsi dan tugas pokok pemerintah yang dikemukakan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah merupakan unsur yang penting dalam memajukan negara dengan fungsinya sebagai pembangun, pemberdaya dan pelayan bagi unsur-unsur lain negara yang ada di bawahnya.

5. Asas-Asas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan asas-asas sebagai berikut:

- a) Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.
- b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi).
- c) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pemerintah di Indonesia, dibagi berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku

pada masing-masing negara dan pemerintahan. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kotadisebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa :

- 1) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Tugas dan wewenang kepala daerah

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD Dan rancangan perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perdatentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama
- e. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
- g. Dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangn.

Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di daerah, arah tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandaskan pada penyelenggaraan kepentingan umum. Sudah menjadi tugas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan umum tersebut guna mencapai harapan daerah dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa.

Fungsi pemerintah serta tugas pokok pemerintah daerah yang dijalankan akan menunjukkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka akan berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya. Halini juga akan berdampak pada terciptanya keteraturan hidup dalam negara dan kesejahteraan hidup. Kesimpulannya bahwa pemerintah merupakan unsur yang penting dalam memajukan negara dengan

fungsinya sebagai pembangun, pemberdaya, pelayan dan pengatur bagi unsur-unsur lainnegera yang ada di bawahnya dan bagi masyarakat.

7. Pemberdayaan masyarakat

Empowerment, yang dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, utamanya Eropa. Konsep *empowerment* mulai nampak di sekitar dekade 70-an, dan kemudian berkembang terus sepanjang dekade 80-an hingga saat ini. Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan (*power*) Pemberdayaan apapun asumsinya adalah menerima adanya kekuasaan sebagai faktor, dan membuat yang tidak berkuasa menjadi memiliki kekuasaan, yaitu yang *powerless* diberi power melalui empowerment sehingga menjadi powerfull. Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata empowerment mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (poverty alleviation) sejak digulirkannya Program Inpres No.5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan-kemiskinan merupakan “saudara kembar”. Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber-sumber daya yang terkait tentang pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.

Kemudian Gunawan Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa: Pemberdayaan masyarakat-dalam keseluruhan rangkaian penyusunan program-program pembangunan, perlu diyakini oleh aparat pemerintah (daerah) sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional, sehingga mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, keyakinan itu juga perlu terus ditanamkan dalam diri aparat yang secara fungsional menangani proses-proses penyusunan program pada kabupaten/kota untuk selanjutnya ditingkatkan serta dimasyarakatkan, kemudian yang terpenting dan juga menjadi tantangan utama adalah bagaimana menerjemahkannya dalam usaha-usaha yang nyata.

Dalam melakukan upaya pemberdayaan, Zubaedi menyatakan ada 3 hal yang harus dilakukan yaitu :

Pertama, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang yaitu mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah masyarakat miliki.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat yaitu upaya yang dilakukan dalam langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan pekerjaan, pasar serta sarana-sarana lainnya.

Ketiga, melindungi masyarakat yaitu perlu adanya langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan juga praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang lemah.

Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti :

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan.
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan).
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
- d. Terjaminnya keamanan.
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan kekhawatiran.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mardikanto mengartikan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan

keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Kemudian, aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta berkelanjutan. Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting.

8. Kemiskinan

Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi orang lain. Tingkat kesenjangan luar biasa dan relatif cukup membahayakan. Karena itu, ketika kebangkitan nasionalisme tidak bisa meningkatkan taraf hidup berperadaban, nasionalisme dapat meredup dan luruh dengan sendirinya sebagaimana yang kita alami dewasa ini. Kemiskinan struktural dan kultural yang permanen dalam kehidupan membuat karakter bangsa ini makin terpuruk.

9. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep yang berwayuh wajah, bermatra multidimensional. Ellis (1984:242-245), misalnya, menunjukkan bahwa dimensi

kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut.

Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori perorang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari adalah contoh kemiskinan absolut. Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya.

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangai seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di Negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini dikatakan sebagai suatu problema karena masalah kemiskinan menuntut adanya upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat.

Menurut Prof. DR. Emil Salim dalam Arifin Noor yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.¹⁸ Dan menurut Prof. Sayogya Dalam Soelaeman Munandar, garis kemiskinan dinyatakan dalam Rp./tahun, ekuivalen dengan nilai tukar beras (kg/orang/bulan, yaitu untuk desa 320/kg/orang/tahun dan untuk kota 480kg/orang/tahun). Atas dasar ukuran ini maka mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, keterampilan, dan sebagainya.
- b. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha.
- c. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan.
- d. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (*selfemployed*), berusaha apa saja.
- e. Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse 1953 (dalam Lincoln Arsyad, 1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian:

Pertama, Kemiskinan Absolut adalah Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya.

Kedua, Kemiskinan Relatif adalah Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

Ketiga, Kemiskinan Kultural adalah Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Keempat, Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan.

Pendapat dikemukakan oleh Ellis menyatakan bahwa Dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial psikologi. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

10. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

11. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal yaitu:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² perorang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ kayu.
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

- f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/sungai/ air hujan.
 - g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah.
 - h. Hanya mengkonsumsi daging/ sasu/ ayam satu kali dalam seminggu.
 - i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
 - k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklinik.
 - l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah; petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- (enam ratus ribu puviah) per bulan.
 - m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar.
 - n. Tidak memeiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), seperti;sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal Rp motor atau barang modal lainnya.
2. Faktor eksternal yaitu keberadaan balita,anak usia sekolah,kesertaan KB, dan penerima kredit usaha (UMKM).Banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah keluarga miskin. Kondisi kemiskinan disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yakni :

- a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki.
- b. Rendahnya derajat kesehatan. Keadaan kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
- c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkungan kemiskinan tersebut.
- d. Kondisi terisolasi. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

12. Teori Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.

- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peranyang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995:571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Soerjono Soekanto (2009:212), mengemukakan Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009:212) menjelaskan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Lebih lanjut Soejono Soekanto mengemukakan aspek–aspek peranan sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma–norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari sudut pandang lain Konsep tentang peran (role) menurut komarudin (1994) yakni sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang maupun sekelompok orang (organisasi) apabila melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Sedangkan jika

peran dihubungkan dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah posisi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah daerah lakukan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat Miskin Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

13. Teori Tindakan Sosial

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.

Max Weber dalam memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive*.¹¹ Interaksi sosial merupakan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Dimana tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang di tujukan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan

yang diharapkan diwaktu yang akan datang. tindakan sosial (*social action*) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif (*subjective meaning*) bagi dan dari aktor pelakunya. Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentudan makna tertentu.

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya sampai mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu nyata. Atau dengan kata lain rasional adalah segala sesuatu yang dapat di nalar dan masuk akal.

14. Teori Structural Fungsional

teori ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti: peranan sosial, pola-pola instutional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Hampir semua penganut ini perkecendrungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lain. Hanya saja menurut Merton pula, sering terjadi pencampuradukan antara motif-motif subjektif dengan pengertian fungsi. Padahal perhatian struktural fungsional harus lebih banyak di tujukan kepada fungsi-fungsi di bandingkan motif-motif.

Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (*equilibrium*).

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap perubahan yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsi onalterhadap yang lain. Sebaliknya kalau ada fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan suatu sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian pada tingkat tertentu umpamanya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan “diperlukan” oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori struktural fungsional memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Kendati Merton dan Parsons di kelompokkan ke dalam struktural fungsional, ada sejumlah perbedaan penting antara keduanya, untuk satu hal, kalau

persons mendukung terciptanya teori besar dan mencakup seluruhnya, Merton lebih memilih teori-teori yang terbatas, dan pada tingkat menengah

B. Kerangka Konsep

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahaan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai sandang, pangan, papan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan berbagai cara dan inovasi dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai penggerak disertai sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai objek pemberdayaan masyarakat miskin adalah memberikan bantuan RASKIN (beras miskin untuk rumah tangga miskin perkecamatan sekabupaten kepulauan selayar, PKH (program keluarga harapan), dan RTLH (rumah tidak layakhuni). Berangkat dari indikator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin diatur dalam Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2012 tentang

Tupoksi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Selayar) mencakup perencanaan, pendataan dan pemberian bantuan. Namun, dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi baik bersifat mendukung maupun yang menghambat prosesnya.

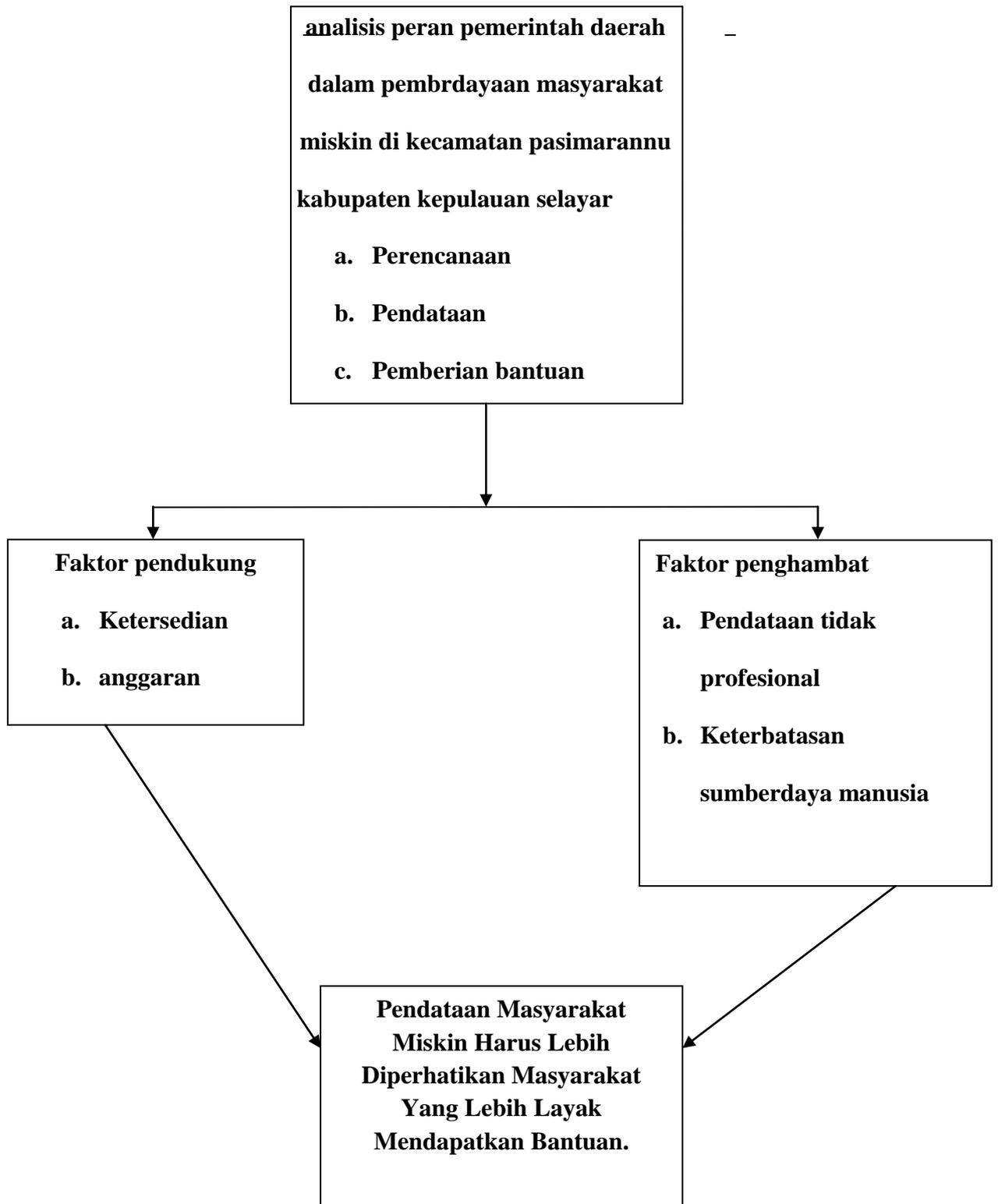
Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya. Pemberdayaan masyarakat miskin memerlukan perencanaan yang matang. Sebab hal ini dapat menentukan kelancaran setiap kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, perencanaan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang rincian tugas Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Selanjutnya tahap pendataan, pendataan adalah proses pencarian atau pengumpulan data. Yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data sesuai yang diharapkan. Sedangkan hasil dari pendataan adalah data, yaitu catatan atas kumpulan fakta. Data yang baik harus obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dipergunakan dalam pengambilan keputusan sehingga kevalidan data akan meningkatkan ketepatan sasaran dan akurat. Pentingnya proses pendataan masyarakat miskin, lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin. Pendataan dilakukan langsung dari Kemensos dan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mendata masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tergolong masyarakat miskin. Setelah dilakukan perencanaan dan pendataan, tahap selanjutnya adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang telah didata untuk mendapatkan bantuan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk sandang, pangan, papan yakni bantuan RASKIN (beras miskin), PKH (program keluarga harapan), dan RTLH (rumah tidak layak huni).

Dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang berpengaruh, baik yang bersifat mendukung maupun bersifat penghambat. Faktor pendukung adalah ketersediaannya anggaran. Anggaran merupakan roda yang dapat menggerakkan kegiatan dalam pemberian bantuan masyarakat miskin. Ketersediaannya anggaran sangat mempengaruhi proses kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin. Ketersediaan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat miskin khususnya di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar ditopang oleh anggaran dari Pemerintah pusat yang diatur dalam APBN. Hal ini sangat membantu Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah proses pendataan yang tidak profesional, dikatakan tidak profesional, karena data penerima bantuan beras miskin di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dari

tahun 2013 hingga 2016 tidak mengalami perubahan atau tetap. Tidak adanya perubahan data dikarenakan adanya kecenderungan bahwa program ini yang penting terlaksana tanpa melihat apakah ada proses yang lebih baik atau tidak, karena data yang ada tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi yang baik dari pihak pemerintah atau tim pendamping terhadap orang-orang yang layak atau tidak layak menerima bantuan. Kedua, tidak tercipta suatu analisis yang baik dari pihak pelaksana raskin untuk mengevaluasi bagaimana kondisi masyarakat miskin yang diberi bantuan, karena dengan di berikan secara terus-menerus bantuan akhirnya masyarakat miskin mengharap terus bantuandari pemerintah dan menjadi ketergantungan. Gambaran singkat peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui bagan berikut:

Gambar. 1. Bagan Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam.

Tipe penelitian ini menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan yang digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari survei literatur, laporan hasil penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi. Melalui pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat dideskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa dari gejala itu. Jadi penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dimana titik pengambilan data penelitian tentang pemberdayaan masyarakat miskin pada: (1). Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, (2).Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, (3). Beberapa Kantor Camat di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, (3).Beberapa Kantor Lurah dan Desa di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposivesampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Bappeda
- 2) Kepala Dinas Sosial
- 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
- 4) Ketua Operator PKH
- 5) Kepala Subbagian Ekonomi
- 6) Camat

7) Lurah/Desa

8) Kelompok Masyarakat Miskin

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu upaya tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti tentang Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi, pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.

Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah handphone, wawancara atau angket dan lembar observasi.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Jenis Penelitian

ini merupakan penelitian lapangan karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari penyebaran kuisioner kepada di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang di peroleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperasenta dan wawancara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik yaitu antara lain:

1) Angket/kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri atau hal-hal yang ia ketahui. tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah. Dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. disamping itu, responden mengetahui informasi tertentu yang diminta.

2) Observasi

pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Peneliti akan turun kelapangan secara langsung untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi masyarakat miskin dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

3) Wawancara

Pertemuan langsung dengan informan dan pengumpulan informasi dari percakapan dengan informan. Adapun teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara mendalam, wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tidak berstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali.

Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitiannya. Didalam melakukan wawancara, instrumen yang digunakan adalah pena dan kertas sebagai alat tulis (catatan lapangan), dan Handphone yang bertujuan untuk mencatat hasil wawancara, merekam pembicaraan dan gambar antara peneliti dan informan serta pedoman wawancara untuk mempermudah peneliti mengingat hal-hal apa saja yang nantinya akan ditanyakan kepada informan.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai dasar pertanyaan yang diutarakan kepada informan. Pertanyaan yang terdapat pada pedoman wawancara merupakan gambaran awal pertanyaan yang akan digunakan untuk mencari data penelitian dilapangan. Pedoman wawancara ini bukan merupakan dipertanyakan ketika wawancara, dalam artian pertanyaan dalam pedoman wawancara bukan merupakan pertanyaan yang terstruktur. Pertanyaan tersebut bias saja berkembang menjadi pertanyaan baru yang tak tertulis dipedoman wawancara yang bertujuan untuk mendapat jawaban penelitian lebih lanjut.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai keadaan keluarga terutama latar belakang kehidupan, masalah-masalah rumah tangga, dan

sebab-sebab istri berperan serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga. Wawancara ini dilakukan kepada istri petani yang biasanya terlebih dahulu melakukan perjanjian kapankah waktu proses wawancara dilakukan.

Peneliti membuat janji terlebih dahulu dengan informan dan juga mendatangi informan baik dirumah maupun ditempat kerjanya (kantor, kandang dan dekat rumah). Wawancara dilakukan pada siang hari dengan mempertimbangkan bahwa pada siang hari informan telah selesai bekerja dan pada waktu malam hari adalah waktu informan beristirahat dengan tujuan saat informan bersantai setelah makan dan sholat. Mendatangi informan ke lokasi selain untuk tujuan wawancara juga untuk tujuan melihat langsung aktifitas informan dalam melakukan pekerjaanya tanpa mengganggu pekerjaan informan.

Untuk mengkaji lebih lanjut hasil wawancara dengan informan peneliti melakukan beberapa kali (2-3) kali wawancara terhadap informan yang sama sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Ketika proses wawancara dilakukan, pertanyaan yang dilontarkan pada informan berlandaskan pada pedoman wawancara yang telah disusun. Sebagai informan penelitian, ada yang merasa malu-malu dan gugup ketika diwawancarai. Namun setelah dilakukan pendekatan secara persuasive dan intensif informan pun mulai merasa nyaman untuk diwawancarai.

4) Dokumentasi

arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang di wawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam analisis data selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.

4. Teknik Keabsahan Data

Dalam setiap pelaksanaan penelitian, data yang terkumpul tentunya tidak semuanya valid dan kredibel. Untuk itu dalam menguji tingkat kredibilitas dan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan cara mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

- a. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang

telah dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan dengan sumber data.

- b. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data, bila data yang dihasilkan berbeda, peneliti kemudian melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumberdata.
- c. Triangulasi Waktu, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain kepada sumber data dalam situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

1. Sejarah Selayar

Selayar sebagai sebuah pulau, telah lama dikenal, tidak hanya dikenal ketika kakawiiin negarakartagama (1365) mengungkapkan nama silajara (selayar) yang disebut bergandengan dengan nama butun, banggawi, bonta yang, mangkasara. Tetapi juga nama selayar juga diungkapkan berbagai naska-naska lokal (lontara).

Asal-usul penemuan selayar bermula ketika seorang ratu yang cantik jelita dari tanah luwu dengan memakai perahu (wenkang) satu layar dengan mendarat suatu pulau bernama silajara. Menurut epos Galigo ratu yang cantik itu utusan sawerigading menuju tanah cina. Dalam epos galigo diceritakan bahwa sang ratu naik perahu mengarungi lautan yang tidak bertepi dengan diikuti perahu emas beserta dayang-dayangnya (lontara, patta bangun selayar). Versi lain menyebutkan bahwa dimasa lampau, selayar dikenal sebagai tempat transit para pedagang rempah-rempah yang akan menuju ke arah timur indonesia. Letaknya yang strategis, sehingga menjadikanya sebagai rute dagang pada saat itu, di pulau selayar, para pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar. Konon kabarnya dari aktifitas pelayaran ini, muncullah nama selayar dari bahasa sansekerta yang berarti satu layar.

Selain nama selayar, pulau ini disebut juga dengan nama Tanah Doang yang berarti tanah tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik ke barat maupun ke timur untuk keselamatan pelayaran mereka. Seiring masuknya penjajah belanda ke indonesia. Selayar menjadi salah satu wilayah jajahan pemerintah belanda pada saat itu. Belanda mulai pemerintah selayar pada tahun 1739. Selayar ditetapkan sebagai sebuah keresidenan (setingkat kabupaten) dimana residen pertamanya adalah W.Coutsier (menjabat dari 1739-1743).

Berturut-turut kemudian selayar diperintah oleh seorang belanda sebanyak 87 residen. Barulah kepala pemerintahan ke-88 dijabat oleh orang selayar, yakni mohammad Oppe Patta Guntjo Sodai, pada tahun 1942. Atas kejadian tersebut, tanggal dan bulan dijadikan tanggal hari jadi kabupaten kepulauan selayar yang dibawah oleh Datuk Ribandang, yang ditandai dengan masuknya agama islam di selayar. Islamnya Raja gantarang dan pangali patta Radja, yang kemudian bernama Sultan Alauddin, pemberian Datuk Ribandang peristiwa itu terjadi pada tahun 1605, sehingga ditetapkan hari jadi kabupaten kepulauan selayar adalah 29 november 1605.

2. profil

kabupaten kepulauan selayar secara geografis, terletak pada posisi antara 5 42 wilayah kabupaten kepulauan selayar terdiri dari 130 buah gugus pulau besar dan kecil dengan luas keseluruhan wilayahnya mencapai 10.503,69 km yang terdiri daratan (1.357,03 km atau 12,92%), Dan lautan (9.146,66 km atau 87,08%). secara Administratif, kabupaten kepulauan selayar terbagi dalam 11 kecamatan, 5 diantaranya berada di kepulauan dan 6 kecamatan lainnya berada di daratan pulau selayar.

secara topografis, fisiografi kabupaten kepulauan selayar bervariasi, terbagi menjadi 3 satuan morfologi, yaitu berupa satuan morfologi, daratan alluvial pantai, satuan morfologi perbukitan dan bergelombang, dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal. satuan morfologi daratan alluvial pantai menempati daratan sempit di wilayah pantai pulau selayar yang terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas, dan lapisan tipis batu gamping koral. sedangkan satuan morfologi perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal dengan ketinggian 356-657 meter dpl diantara puncak gunung bontoharu (435m). gunung bontosikuyu (607 m) satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lava, konglomerat, tufa dengan selingan batuan sediment laut.

3 .Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten kepulauan selayar merupakan wilayah provinsi sulawesi selatan sebagai wilayah kepulauan yang terletak di ujung selatan pulau sulawesi. Secara astronomis, wilayah kabupaten kepulauan selayar terletak antara.

antara $5^{\circ} 42'$ dan $7^{\circ} 35'$ ls dan $120^{\circ} 15'$ dan $122^{\circ} 30'$ bt. Kabupaten kepulauan selayar memiliki jumlah pulau sebanyak 130, sedangkan luas wilayah **10.503,69 km²** meliputi luas duyuaratan **1.357,03 km²** dan luas wilayah perairan laut **9.146,66 km²**.

Adapun batas-batas wilayah administrasi kabupaten kepulauan selayar adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten bulukumba;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan laut flores
- c. Sebelah timur berbatasan dengan provinsi nusa tenggara timur;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan laut flores dan selat makassar.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai pada Tahun 2011 wilayah administratifnya mencakup 11 kecamatan, yakni Kecamatan Pasimarannu, Pasimasunggu Timur, Pasilambena, Pasimasunggu, Taka Bonerate, Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomanai, Benteng, Bontomatene dan Buki dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 75. Faktor transportasi sangat menentukan pengembangan kawasan sebab interaksi antara moda darat dan laut akan meningkatkan tingkat aksesibilitasnya. Luas wilayah dan jumlah desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.3: Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
			Ha	%
1.	Pasimarannu	6	176.35	4,13
2.	Pasilambena	5	102.99	9,86
3.	Pasimasunggu	6	114.50	15,20
4.	Pasimasunggu Timur	4	47.93	13,78
	Takabonerate	8	221.07	17,16
6.	Bontosikuyu	11	199.11	0,48
7.	Bontoharu	8	129.75	8,87
8.	Bontomanai	8	115.56	7,13
9.	Benteng	3	7.12	10,81
10.	Bontomatene	11	159.92	11,18
11.	Buki	5	82.73	1,41
Total (Kab. Kep. Selayar)		75	1.357,03	100

3. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2010 adalah 90 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada setiap kecamatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum merata. Kecamatan Benteng yang memiliki luas wilayah sebesar 7,12 km² dihuni oleh 18.860 jiwa penduduk. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk di Kecamatan Benteng berada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk Kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepadatan penduduk di Kecamatan Benteng pada tahun 2010 mencapai 2.649 jiwa/km². Adapun daerah yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Pasimarannu yaitu 51 jiwa/km².

Dari data yang ada juga diketahui bahwa distribusi penduduk sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan Pulau Selayar. Tentunya ini berkaitan dengan luas wilayah yang lebih besar dibanding pulau lainnya.

4. Komposisi Penduduk

Uraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum dapat dikatakan bahwa selama periode 2004-2009 Kabupaten Kepulauan Selayar masih mempunyai struktur penduduk sedang, sebab proporsi penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak melampaui angka 40%. Pada tahun 2009 jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun mencapai 29,64% (36.091 jiwa, terdiri dari 18.316 pria dan 17.775 wanita) dari total

penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk kelompok usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 77.488 jiwa (63,64%) dan penduduk berusia 65 tahun ke atas hanya sekitar 6,71% atau 8.170 jiwa (terdiri dari 3.553 pria dan 4.617 wanita).

B. Kecamatan Pasimarannu

Pasimarannu adalah sebuah kecamatan di kabupaten kepulauan selayar, Sulawesi selatan, Indonesia. Pasimarannu berjarak sekitar 119 mil dari kota Benteng dengan waktu tempuh perjalanan laut ± 11 jam. Kecamatan Pasimarannu terdiri dari 6 desa dan 17 dusun lingkungan.

C. Kelurahan Majapahit

Kelurahan Majapahit yang dikenal dengan kampung Majapahit sudah terbentuk sejak tahun 1900 perkembangan kampung Majapahit ditandai sejak masuknya penduduk pendatang dari berbagai daerah di Sulawesi selatan kedatangan penduduk di tahun 1950-1980 di kampung Majapahit wilayah ini mulai berkembang dari segi aspek jumlah pertumbuhan penduduk. Wilayah-wilayah kampung Majapahit yang masih banyak terdapat banyak tanah kosong seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Diakhir tahun 1950, secara administratif status kampung Majapahit berubah menjadi lingkungan berdasarkan peraturan pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar. Sejak itu kampung Majapahit tidak lagi dipimpin oleh matoa tetapi peralihan pemerintahan kampung Majapahit dikendalikan oleh kepala kampung. Kemudian pada tahun 1960-1980 sistem pemerintah lingkungan di Majapahit kecamatan Pasimarannu dengan luas 2,6 Ha serta jumlah penduduk 6.244 jiwa, merupakan salah

satu kelurahan yang berada di paling ujung yang merupakan salah satu jalur di kabupaten kepulauan selayar.

Adapun gambaran singkat tentang wilayah kelurahan majapahit kecamatan pasimarannu kabupaten kepulauan selayar dapat dideskripsikan, yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan umum geografis wilayah kelurahan majapahit merupakan 1 dari 11 kelurahan yang di kecamatan pasimarannu dan berada pada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 m dari permukaan laut.

2. Agama

Kerukunan umat beragama dalam wilayah kelurahan majapahit dengan pemeluk agama yang ada islam. Adapun kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan adalah pengajian majelis ta'lim yang berjalan setiap bulannya serta kegiatan pengajian al-qur'an berjalan dengan baik.

3. Pembangunan

Bidang pekerjaan umum selama tahun 2017 kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan majapahit meliputi pembangunan drainase, perbaikan jalan dan penataan lorong. Untuk tahun 2018 kegiatan pembangunan sedang dalam pembahasan melalui musyawarah rencana pembanguana (musrenbang) dan pengusulan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui musrenbang online seperti yang baru-baru ini telah dilaksanakan.

4. Kesehatan

Keberhasilan Pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari 2 aspek

yaitu sarana kesehatan dan sumber daya manusia. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2009 terdiri dari 1 Rumah Sakit, 13 Puskesmas, 60 Puskesmas Pembantu, 258 Posyandu. Disamping sarana kesehatan, ada sumber daya manusia di bidang kesehatan seperti dokter umum sebanyak 14 orang, dokter gigi 4 orang, perawat 132 orang, bidan 51 orang, sanitarian ada 15 orang dan pembantu perawat sebanyak 18 orang.

5. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDA) suatu Negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Selayar jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 114 buah, jumlah guru sebanyak 98 orang dengan jumlah siswa sebanyak 3.297 orang. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 139 buah dengan jumlah guru sebanyak 1.181 orang termasuk guru honor serta jumlah murid sebanyak 15.187 Orang. Jumlah SMP sebanyak 47 buah dengan jumlah guru sebanyak 1.005 orang dan murid sebanyak 5.232 orang. Jumlah SMU 9 buah dengan jumlah guru 179 orang dan murid 2.600 orang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten kepulauan selayar

dalam seksi pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin dilakukan dengan tahap perencanaan, pendataan, dan pemberian bantuan. sesuai yang di katakan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Syamsuddin B, S.Sos, M.si, MH (40 Tahun) yang mengatakan bahwa;

“Di Dinas Sosial untuk pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin dilakukan beberapa tahap. Tahap tersebut meliputi, tahap perencanaan, pendataan dan pemberian bantuan. Pada tahap perencanaan, kita lihat Visi Misi Bupati selayar dan dikaitkan dengan RPJMD terus dikaitkan dengan perencanaan di masing masing dinas, setelah itu dilakukan pendataan masyarakat miskin yang mana layak mendapatkan bantuan dan yang tidak layak mendapatkan bantuan, selanjutnya tahap terakhir pemberian bantuan, setelah dilakukan perencanaan dan pendataan kita memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.”

Itulah hasil wawancara dapat di lihat bahwa dalam pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan dengan beberapa tahap, yakni perencanaan, pendataan, dan pemberian bantuan serta di dukung dalam pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten kepulauan selayar tahun 2016 dan Perbup No 9 Tahun 2012 Tentang Tupoksi Dinas Sosial.

Berikut dipaparkan lebih jelas tentang tahap-tahap yang dilakukan Dinas Sosial, Kabupaten kepulauan selayar dalam pemberdayaan masyarakat miskin

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya. Proses pemberdayaan masyarakat miskin memerlukan perencanaan yang matang. Sebab hal ini dapat menentukan kelancaran setiap kebijakan yang akan dilakukan pemerintah.

Dalam tahap perencanaan, hal utama untuk melaksanakan kebijakan pemerintah harus mengacu pada Visi Misi Bupati terpilih. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh Camat Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak, Drs. H. Askari mengatakan bahwa

“Dalam perencanaan, yang pertama kita lihat Visi Misi Bupati selayar dan dikaitkan dengan RPJMD terus dikaitkan dengan perencanaan di masing masing dinas, adapun target Dinas Sosial Kabupaten kepulauan selayar yang dikaitkan dengan RPJMD yaitu pengurangan angka kemiskinan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah Kabupaten kepulauan selayar. Selanjutnya, langkah-langkah yang ditempuh

pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial dimulai dengan proses perencanaan. Dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten kepulauan selayar, camat melakukan penyusunan program dan kegiatan terkait pengentasan masyarakat miskin.

hasil wawancara maka dapat disimpulkan tahapan perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin. Tahapan perencanaan telah diatur secara matang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepulauan selayar. Perencanaan sangat penting dilakukan karena merupakan tahap awal untuk memilih sasaran dan menetapkan cara mencapai tujuan. Untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat miskin, SKPD terkait hingga Kecamatan harus bekerjasama. Dalam tahap perencanaan pemerintah daerah melakukan penyusunan program pemberdayaan masyarakat miskin yakni pemberian bantuan, bantuan tersebut berupa bantuan beras miskin, bantuan program keluarga harapan dan bantuan rumah tidak layak huni. Program yang akan dilakukan kedepannya harus tepat sasaran dalam membantu dan mementingkan kepentingan masyarakat miskin.

2. Pendataan

Pendataan adalah proses pencarian atau pengumpulan data. Yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data sesuai yang diharapkan. Sedangkan hasil dari pendataan adalah data, yaitu catatan atas kumpulan fakta. Data yang baik harus obyektif dan dapat di pertanggungjawabkan. Data dipergunakan dalam pengambilan keputusan sehingga kevalidan data akan meningkatkan ketepatan sasaran dan akurat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bappeda, Bapak H. SUBAIR B, S.Sos, M.si mengatakan bahwa ;

“Indikator dikatakan masyarakat miskin di lihat dari pendapatan yang rendah, rumahnya yang tidak layak huni atau bisa saja rumah sudah layak tapi tidak ada dalam keluarga yang memiliki pekerjaan misalnya kepala Rumah Tangganya sudah meninggal sehingga tidak ada pendapatannya jadi tergolong miskin itu secara umum.lebih khususnya lagi dilihat dari rumahnya yang berlantai tanah, dan beratap gubuk”.

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pentingnya untuk mengetahui ciri-ciri dari masyarakat miskin. Selain itu, Permensos RI Nomor 08 tahun 2012, yang dimaksud dengan PMKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Secara ringkas dapat jelaskan bahwa PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok yang mengalami masalah sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi, contoh suatu keluarga fakir miskin, untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari susah, masalah sandang, tempat tinggal yang tidak layak, kehidupan masyarakat tersisihkan, biaya kesehatan dan biaya sekolah anak tidak terpenuhi. Hasil pendataan masyarakat miskin yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial di Kabupaten kepulauan.

3. Pemberian Bantuan

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin adalah memberikan bantuan.Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk sandang, pangan, papan yakni bantuan RASKIN (beras miskin), PKH (program keluarga harapan), dan RTLH (rumah tidak layak huni).

a. Bantuan Raskin (Beras Miskin)

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Rumah tangga miskin melalui pendistribusian program beras untuk rumah tanggamiskin setara 15 kg/rumah tangga selama 12 bulan dengan harga Rp.1.600,- /kg.

Berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 menjelaskan bahwa pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 selanjutnya disebut pedoman umum, merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Sitti selaku Kepala Subbagian Ekonomi bahwa;

“Bantuan Raskin untuk masyarakat berpendapatan rendah merupakan program dari pusat (Kemensos) dan dana anggaran yang digunakan dari APBN karena program pusat, kita disini hanya membantu menyalurkan dari program pemerintah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemberian Bantuan Raskin di Kabupaten kepulauan selayar telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial.Hal ini merupakan amanat dari program nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.Pemberian bantuan Raskin menggunakan dari APBN. Selanjutnya, dalam Bab II Pedoman Umum Pasal 2 diatur pelaksana Pengelolaan Dan Pengorganisasian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Bantuan raskin di Kabupaten kepulauan selayar mencakup di 11 Kecamatan berjumlah 6,518,160/tahun ton beras yang diberikan dari provinsi, jumlah penerima beras miskin pada tahun 2012 sebesar 37,967 penerima dan jumlah di tahun 2013-2016 mencapai 36,212 rumah tangga. Raskin bertujuan untuk membantu kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ramlah (42 Tahun) yang mengatakan bahwa;

“Bantuan raskin dari pemerintah sangat membantu kebutuhan sehari-hari keluarga saya, saya senang dengan adanya bantuan pemerintah karena mendapatkan harga beras yang jauh lebih murah dari harga normalnya. Saya membeli harga raskin Rp.1.600,-/kg di banding dengan harga normalnya yang berkisar 8.000 hingga 10.000,-/liter.”

Sejalan dengan pendapat Ibu Ramlah diatas, Ibu Karmila juga mengatakan bahwa;

‘Dengan adanya bantuan raskin dari pemerintah sebanyak 15 kg/bulan sangat membantu kehidupan kami, belum lagi kita membeli lauk setiap hari karena dengan bantuan raskin beban hidup sedikit berkurang walaupun dibeli tapi harganya jauh lebih murah.’

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa bantuan raskin sangat membantu masyarakat miskin karena mendapatkan harga beras yang jauh lebih murah dari harga normalnya. Pemberian bantuan raskin diberikan setiap bulan sebanyak 15 kg dengan harga Rp.1.600. Namun dilain sisi berdasarkan data yang peneliti dapatkan yang bersumber dari Dinas Sosial, Kabupaten Kepulauan bahwa jumlah penerima bantuan raskin dari tahun 2013 hingga 2016 tidak mengalami perubahan (data tetap). Tidak adanya perubahan data dikarenakan adanya kecenderungan bahwa program ini yang penting terlaksana tanpa melihat apakah ada progres yang lebih baik atau tidak, karena data yang ada tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi yang baik dari pihak pemerintah atau tim pendamping terhadap orang-orang yang layak atau tidak layak menerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa bantuan raskin sangat membantu masyarakat miskin karena mendapatkan hargaberas yang jauh lebih murah dari harga normalnya. Pemberian bantuan raskin diberikan setiap bulan sebanyak 15 kg dengan harga Rp.1.600. Namun dilain sisi berdasarkan data yang peneliti dapatkan yang bersumber dari Dinas Sosial, Kabupaten kepulauan selayar bahwa jumlah penerima bantuan raskin dari tahun 2013 hingga 2016 tidak mengalami perubahan (data tetap). Tidak adanya perubahan data dikarenakan adanya kecenderungan bahwa program ini yang penting terlaksana tanpa melihat apakah ada progres yang lebih baik atau tidak, karena data yang ada tidak berubah. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak ada kordinasi yang baik dari pihak pemerintah atau tim pendamping terhadap orang orang yang layak atau tidak layak menerima bantuan.

Selain itu, peneliti juga turun kelapangan di wilayah Kecamatan pasimasunggu dan Kecamatan Pasilambena karena melihat jumlah masyarakat miskin di Kecamatan pasimasunggu sebesar 28.691 penduuduk dan di Kecamatan Pasilambena berjumlah 3.273 jiwa penduduk. Peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan yang tergolong banyak masyarakat miskinnya dan di Kecamatan yang kurang masyarakat miskinnya. Berikut rincian jumlah masyarakat miskin penerima raskin di Kecamatan pasimasunggu dan Kecamatan Pasilambena tahun 2016.

Dari hasil penelitian perbandingan jumlah penerima bantuan raskin di Kecamatan pasimasunggu dan Kecamatan Pasilambena sangat berbeda. Dikarenakan jumlah penduduk di Kecamatan pasimasunggu lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Pasilambena begitupun dengan jumlah masyarakat miskin di Kecamatan pasimasunggu lebih banyak dibandikan Kecamatan Pasilambena. Jumlah penduduk Kecamatan pasimasunggu 33,547 penduduk dan Kecamatan Pasilambena 6.020 jiwa penduduk, serta jumlah masyarakat miskin di Kecamatan pasimasunggu sebesar 28,691 penduduk dan Kecamatan Pasilambena 3.273 penduduk miskin. Merujuk pada kuota pemberian bantuan salah satunya dilihat dari seberapa banyak jumlah masyarakat miskin. Kuota lokasi raskin yang diberikan per Kecamatan sesuai dengan jumlah masyarakat miskin dan masyarakat yang memenuhi syarat miskin serta layak untuk diberikan bantuan.

b. Batuan PKH (Program Keluarga Harapan)

Program keluarga harapan (PKH) mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007. Program ini merupakan produk kebijakan untuk menanggulangi permasalahan sosial (masyarakat miskin). Pada tahun pertama penerapannya, daerah-daerah yang menjadi tempat percontohan yaitu DKI Jakarta, Jawa timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan juga Gorontalo. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban masyarakat miskin dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah rumah tangga miskin yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH. Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; (2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur

kesehatan PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirham, A.Md.K selaku operator PKH terkait dengan program PKH, mengatakan bahwa,

Persyaratan bantuan langsung tunai PKH (Program Keluarga Harapan) diperuntukkan untuk masyarakat miskin. seperti ibu hamil, punya balita, punya anak sekolah SD sampai SMA, itu syarat untuk mendapatkan bantuan.”

Dari hasil penelitian perbandingan jumlah penerima bantuan PKH di Kecamatan pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena sangat berbeda. Jumlah yang mendapatkan PKH Kecamatan pasimasunggu 1.566 penerima dan Kecamatan Pasilambena 219 penerima PKH dikarenakan jumlah penduduk di Kecamatan pasimarannu lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Pasilambena begitupun dengan jumlah masyarakat miskin di Kecamatan pasimarannu lebih banyak dibandingkan Kecamatan Pasilambena. Jumlah masyarakat miskin di Kecamatan pasimarannu sebesar 28,691 penduduk dan Kecamatan Pasilambena 3.273 penduduk miskin. Merujuk pada kuota pemberian bantuan salah satunya dilihat dari seberapa banyak jumlah masyarakat miskin, pemberian bantuan PKH di Kecamatan sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang terdaftar. Dalam pemberian bantuan PKH di Kecamatan yang banyak masyarakat miskinnya dan di Kecamatan yang Kurang masyarakat miskinnya terlaksana dengan baik dan program tersebut berhasil, karena pemberian bantuan masyarakat miskin tidak diutamakan yang banyak masyarakat miskinnya tapi bagaimana pemerintah menyetarakan bantuan tersebut. Kedua Kecamatan tersebut telah diberikan bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat.

c. Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercipta keamanan. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Pembangunan rumah swadaya merupakan Program Pemerintah untuk membantu warga miskin agar memiliki rumah yang layak huni. Program ini menjadi salah satu Program unggulan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), yang memang di utuskan Presiden untuk menangani masalah perumahan dasar hukum dari adanya RTLH ini adalah adanya peraturan kementerian yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program ini pada dasarnya merupakan stimulant atau pendorong bagi warga miskin agar bias memperbaiki rumahnya yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat sehingga menjadi layak huni. Kemiskinan itu memiliki beberapa indikator, salah satunya adalah rumah, rumah itu terdiri dari atap, lantai dan dinding. Jika ini sudah dapat di penuhi maka sudah dapat

di tangani dan di atasi permasalahannya maka tidak akan ada lagi penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional dari dulu hingga kini.

Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial. Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk memperbaiki RTLH tersebut, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) yang dipadukan dengan pembuatan Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

a. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kepulauan Selayar .

Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan pasimarannu Kabupaten kepulauan selayar adalah ketersediaannya anggaran. Anggaran merupakan roda yang dapat menggerakkan kegiatan dalam pemberian bantuan masyarakat miskin. Ketersediaannya anggaran sangat mempengaruhi proses kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin. Implementasi pemerintah pada tahun

2012 disajikan untuk setiap sasaran yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah tahun 2012. Secara umum kinerja pemerintah dapat dilihat dari upaya pemberdayaan sumberdaya manusia modal utama pembangunan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mahmud S.kel, MM selaku kepala seksi fakir miskin mengatakan bahwa:

“Ketersediaannya anggaran dari pusat menjadi faktor pendukung pemberdayaan masyarakat miskin, karena anggaran merupakan hal yang paling menentukan keberhasilan suatu kegiatan dalam hal ini pemberdayaan masyarakat miskin. Pembangunan yang dilaksanakan difokuskan pada berbagai bidang yang dianggap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan ketersediaan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat miskin khususnya di Kabupaten kepulauan selayar ditopang oleh anggaran dari Pemerintah pusat yang diatur dalam APBN. Jumlah anggaran bantuan RASKIN, rumah yang akan dibedah dan di Kecamatan pasimarannu yang akan dilaksanakan bantuan RTLH. Bantuan RTLH merupakan program baru yang akan dilaksanakan di Kabupaten kepulauan selayar dan baru di Kecamatan pasimarannu akan dilaksanakan. Berdasarkan jumlah anggaran dari program Nasional, hal tersebut sangat membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskindi Kabupaten kepulauan selayar.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan yang bersumber dari Dinas Sosial, Kabupaten selayar bahwa jumlah penerima bantuan raskin dari tahun 2013 hingga 2016 tidak mengalami perubahan (data tetap). Tidak adanya perubahan data dikarenakan adanya kecenderungan bahwa program ini yang penting terlaksana tanpa melihat apakah ada progres yang lebih baik atau tidak,karena data yang ada tidak

berubah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi yang baik dari pihak pemerintah atau tim pendamping terhadap orang-orang yang layak atau tidak layak menerima bantuan. Kedua, tidak tercipta suatu analisis yang baik dari pihak pelaksana raskin untuk mengevaluasi bagaimana kondisi masyarakat miskin yang diberi bantuan, karena dengan di berikan secara terus-menerus bantuan akhirnya masyarakat miskin mengharap terus bantuan dari pemerintah dan menjadi ketergantungan.

Sejalan dengan yang di kemukakan oleh salah satu desa majapahit Kecamatan pasimarannu mengatakan bahwa;

“Di desa majapahit data masyarakat miskin dan penerima bantuan tidak sesuai karena ada orang yang berhak mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan karena data yang digunakan data yang lama.”

Proses pendataan bantuan beras miskin yang tidak tepat sasaran, karena masih banyaknya masyarakat yang lebih layak mendapatkan bantuan tersebut malah tidak menerima bantuan justru yang mampu atau tidak layak mendapatkan bantuan malah mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga proses pendataan masyarakat miskin tidak profesional. Selanjutnya, petugas hanya mendata masyarakat miskin setelah itu tidak mengikuti seperti apa kondisi orang yang didata tersebut, karena ketika dia melakukan pendataan yang baru pasti ada yang berubah, paling tidak ada masyarakat miskin yang sudah berdaya dan mungkin juga sudah tidak bersyarat lagi untuk mendapatkan bantuan.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik dari hasil data observasi, wawancara, maupun dokumentasi peneliti terhadap subjek yang

diteliti, maka peneliti akan melakukan pembahasan mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

a. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar akan suatu kegiatan yang dilakukan secara berencana, menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu dan terencana dengan baik. Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang bersifat mendukung maupun menghambat proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kepulauan Selayar .

Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan pasimarannu Kabupaten kepulauan selayar adalah ketersediaannya anggaran. Anggaran merupakan roda yang dapat menggerakkan kegiatan dalam pemberian bantuan masyarakat miskin. Ketersediaannya anggaran sangat mempengaruhi proses kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin. Implementasi pemerintah pada tahun 2012 disajikan untuk setiap sasaran yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah tahun 2012. Secara umum kinerja pemerintah dapat dilihat dari upaya pemberdayaan sumberdaya manusia modal utama pembangunan.

2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten kepulauan selayar.

a.. Pendataan Yang Tidak Profesional

Faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten kepulauan selayar adalah proses pendataan yang tidak profesional, halini disebabkan karena data penerima bantuan beras miskin di Kabupaten kepulauan selayar dari tahun 2013 hingga 2016 tidak berubah. Idealnya proses pendataan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pemberdayaan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila didalam Pemerintah Daerah sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itu, pentingnya peran sumberdaya manusia dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam hal

proses pendataan karena merupakan unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Daerah dalam program pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten kepulauan selayar.

Sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang terdiri atas tiga tahap, yakni perencanaan, pendataan, dan pemberian bantuan. Namun dalam proses pendataan penerima bantuan beras miskin terlihat buruk dan tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah penerima bantuan beras miskin dari tahun 2013 hingga 2016 tidak mengalami perubahan, dikarenakan karena minimnya sumberdaya manusia dalam melakukan proses pendataan masyarakat miskin. Idealnya proses pendataan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan masyarakat miskin atau fakir miskin dalam hal pendataan pada (Pasal 8 ayat 5) menegaskan bahwa verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Tidak adanya perubahan data mengakibatkan proses administratif yang belum maksimal sehingga tidak tercipta suatu proses administrasi jumlah penduduk miskin dengan baik.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam pembahasan 1 bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah Kabupaten kepulauan selayar dalam hal ini Dinas Sosial, dalam pemberdayaan msyarakat miskin Kabupaten kepulauan selayar meliputi, perencanaan, pendataan, dan pemberian bantuan. Pelaksanaan perencanaan, terhadap masyarakat miskin terlihat belum maksimal karena kurang terjalin kordinasi yang baik antar pemerintah daerah. Dalam proses pendataan masyarakat miskin khususnya pendataan penerima bantuan beras miskin (Raskin) tidak profesional, jumlah penerima bantuan raskin dari tahun 2013 hingga 2016 tidak mengalami perubahan (data tetap). Dalam pemberian bantuan, terlihat baik dan maksimal. Bantuan untuk masyarakat miskin secara keseluruhan 11 Kecamatan di Kabupaten kepulauan selayar sudah mendapatkan bantuan.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kabupaten kepulauan selayar terbagi menjadi dua yakni factor pendukung dan factor enghambat. Factor pendukung yakni ketersediaan nggaran untuk pembrdayaan masyarakat miskin di kabupaten kepulauan selayar di topang oleh anggaran dari pemerintah pusat yang diatur dalam APBN. Hal ini sangat membantu pemerintah daerah untuk membantu masyarakat miskin di kabupaten kepulauan selayar.

3. selayar. Mengingat pemberdayaan miskin merupakan prioritas utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yakni pendataan tidak profesional, proses pendataan masyarakat miskin di Kabupaten kepulauan selayar, proses pendataan bantuan beras miskin yang tidak tepat sasaran, karena masih banyaknya masyarakat yang lebih layak mendapatkan bantuan tersebut malah tidak menerima bantuan justru yang mampu atau tidak layak mendapatkan bantuan malah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dinas Sosial, Kabupaten kepulauan selayar dalam pemberdayaan masyarakat miskin seyogyanya lebih intens koordinasi dengan dinas-dinas terkait, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
2. Dalam proses pendataan masyarakat miskin khususnya pendataan penerima bantuan beras miskin harus dilakukan perbaharuan data setiap tahunnya sehingga dapat diketahui masyarakat yang sudah tidak berhak lagi mendapatkan bantuan atau masyarakat yang sudah tidak bersyarat lagi digolongkan masyarakat miskin. Disamping itu dalam pelaksanaan pendataan masyarakat miskin harus lebih diperhatikan masyarakat yang lebih layak mendapatkan bantuan, sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Faried. 1996. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Pemerintahan Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiardjo, Miriam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Bambang. "Hukum dan Kebijakan Publik". Sinar Grafika, Jakarta :1994.
Soegijoko, 2001. *Kemiskinan dan Perencanaan*.
- Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kansil, Christine. 2014. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslim, Azis. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- Noor, Arifin. 2007. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : CV. Pustaka Setia. Sunggono, *Pembangunan di Indonesia*. Yayasan Soegikoko: Bandung.
- Onny S. Prijono. dan A.M.W. Pranarka, 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya. Aksara
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara..
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunarno, Siswanto. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Suharto, Edi. 2103. *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soejito, Irawan. 1984. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta Bina

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan ang Baik) Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan*
- Santosa Pandji. (2008). *Administrasi Publik (Teori Dan Aplikasi Good Governance)*. Penerbitan oleh: PT Refika Aditama, Bandung
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan ang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pengembangan Alternatif. Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. *Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: CV Mandar Maju.

PENELITIAN YANG RELEVAN

- Dady Afrianto. 2012, *Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak*. Yogyakarta.
- Muhammad nurdin. 2014, *pemberdayaan masyarakat petani jagung di biringbulu* Yogyakarta.
- Zuhroh rosyidah. 2017, *analisis pendampingan program desaku menanti dalam pemberdayaan warga binaan social menuju kehidupan mandiri*. malang.

LAMPIRAN



Wawancara Dengan Camat Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar



Wawancara dengan kepala dinas social, bapak H. Samsuddin



Wawancara dengan Kepala Seksi Fakir Miskin, Bapak Mahmud



Wawancara dengan kepala subbagian ekonomi, ibu Dra. H. Sitti



Wawancara Dengan Kepala Desa Majapahit



Wawancara Ketua Operato (PKH), Bapak Dirham



Wawancara Dengan Ibu Ramlah



Wawancara Dengan Ibu Karmila

PEDOMAN WAWANCARA**(INFORMAN)**

Narasumber :

Nama ;

Jenis kelamin :

Alamat :

Tanda Tangan :

1. Apakah pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum Dan undang-undang.?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan?
 - a. Memberikan bantuan
 - b. Tidak peduli
3. Apakah pemerintah melakukan tugasnya dengan baik.?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan.?
 - a. Kurangnya lapangan kerja
 - b. Tidak memiliki ijazah

5. Jika pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka akan berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya atau tidak.?
- a. Ya
 - b. Tidak

Pertanyaan

1. Bagaimana peran pemerintah kabupaten kepulauan selayar dapat dilihat dari upaya peberdayaan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan.?
2. Bagaimana implementasi PERDA kabupaten kepulauan selayar No.10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di desa majapahit kecamatan pasimaranu kabupaten kepulauan selayar?
3. Bagaimana menurut ibu dengan adanya program bantuan raskin dari pemerintah.?
4. Apakah persyaratan bantuan langsung tunai PKH (program keluarga harapan) untuk masyarakat miskin.?
5. Apakah salah satu program penanggulangan kemiskinan.?
6. Apakah ketersediaan anggaran yang dapat menggerakkan kegiatan dalam pemberian bantuan masyarakat miskin.?
7. Bagaimana menurut bapak proses pendataan masyarakat miskin di desa majapahit.?
8. Bagaimana untuk mengetahui ciri-ciri dari masyarakat miskin.?

LEMBAR OBSERVASI

Hari/tanggal :

Tempat :

No	Indikator yang diamati	Skor			
		1	2	3	4
1	Lokasi observasi				
2	Pengaruh terjadinya kemiskinan				
3	Peran pemerintah dalam menuntaskan masyarakat miskin				
4	Proses terjadinya kemiskinan				

TABEL INTERPERTASI

wawancara	Pertanyaan	jawaban
H. Syamsuddin B, S. Sos, M. Si, MH (Kepala Dinas)	1. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari upaya pemberdayaan sumberdaya manusia sebagai modal utama pembangunan.?	Di dinas sosial untuk pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin dilakukan beberapa tahap. Tahap tersebut meliputi, tahap perencanaan, pendataan, dan pemberian bantuan. Pada tahap perencanaan, kita lihat visi misi bupati selayar dan dikaitkan dengan perencanaan masing-masing dinas setelah itu dilakukan pendataan masyarakat miskin yang mana layak mendapatkan bantuan dan yang tidak layak mendapatkan bantuan, selanjutnya tahap terakhir pemberian bantuan, setelah dilakukan perencanaan dan pendataan kita memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
Drs.H. Askari (camat)	2. Bagaimana implementasi perda kabupaten kepulauan selayar no, 10, tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin didesa majapahit kecamatan pasimarannu kabupaten kepulauan selayar .?	Dalam perencanaan, yang pertama kita lihat visi misi bupati selayar dan dikaitkan dengan RPJMD terus dikaitkan dengan perencanaan di masing-masing dinas, adapun target dinas social kabupaten kepulauan selayar yang dikaitkan dengan RPJMD yaitu pengurangan angka kemiskinan.
Sos.H. Subair B, Sos, M.Si (kepala bappeda)	3. bagaimana untuk mengetahui ciri-ciri dari	Indicator dikatakan msyarakat miskin dilihat

	masyarakat miskin.?	dari pendapatan yang rendah, rumahnya yang tidak layak huni atau bias sajarumah sudah layak tapi tidak ada dalam keluarga yang memiliki pekerjaan misalnya kepada rumah tangganya. sudah meninggal sehingga tidak ada pendapatannya jadi tergolong miskin itu secara umu. Lebih khususnya lagi dilihat dari rumahnya yang berlantai tanah, dan beratap gubuk.
Dra. Hj. Sitti (kepala subbagian ekonomi)	4. apakah salah satu program penanggulangan kemiskinan.?	Bantuan raskin untuk masyarakat berpendapatan rendah merupakan program dari pusat (kemensos) dan dana anggaran yang digunakan dari APBN karena program pusat, disini hanya membantu menyalurkan dari program pemerintah.
Ibu ramlah	5. bagaimana menurut ibu dengan adanya bantuan raskin dari pemerintah.?	Bantuan raskin dari pemerintah sangat membantu kebutuhan sehari-hari keluarga saya, saya senang dengan adanya bantuan pemerintah karena mendapatkan harga raskin Rp . 1.600,- kg di banding dengan harga normalnya yang berkisar 8.000 hingga 10.000,- liter.
Dirham. A. Md. K (Selaku operator PKH).	6. Apakah persyaratan bantuan langsung tunai PKH (program keluarga harapan) untuk	Persyaratan bantuan langsung tunai PKH (program keluarga harapan) diperuntukkan

	masyarakat miskin.?	untuk masyarakat miskin. Seperti ibu hamil, punya balita, punya anak sekolah SD sampai SMA, itu syarat untuk mendapatkan bantuan.
Mahmud S. Kel, MM (selaku kepala seksi fakir miskin).	7.apakah ketersediaan anggaran yang dapat menggerakkan kegiatan dalam pemberian bantuan masyarakat miskin.?	Ketersediannya anggaran dari pusat menjadi factor pendukung pemberdayaan masyarakat miskin, karena anggaran merupakan hal yang paling menentukan keberhasilan suatu kegiatan dalam hal ini pemberdayaan masyarakat miskin. Pembangunan yang dilaksanakan difokuskan pada berbagai bidang yang dianggap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Bapak Nurdin (Kepala Desa)	8.bagaimana menurut bapak proses pendataan masyarakat miskin di desa majapahit.?	Di desa majapahit data masyarakat miskin dan penerimaan bantuan tidak sesuai karena ada orang yang berhak mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan karena data yang digunakan data yang lama.